

PENGUATAN TATA KELOLA KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN DI TINGKAT DAERAH: STUDI KEBIJAKAN RAD-KSB PROVINSI JAMBI

*Strengthening Sustainable Palm Oil Governance at the Subnational Level
: A Policy Study of RAD-KSB in Jambi Province*

Muhammad Abdul Aziz¹, Ahmad Subhan², Fuad Muchlis³, Rr.Dwi Betharia Endahayu⁴

^{1,3}Fakultas Pertanian Universitas Jambi, Jalan Jambi – Muara Bulian No.KM. 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, azizfauziee4671@gmail.com; fuadm@unja.ac.id

²Fisipol Universitas Nurdin Hamzah, Jl. Kolonel Abunjani No.RT 25, Selamat, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi. subhanlitbang@gmail.com

⁴Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jambi, Jl. RM. Nur Admadibrata No. 1, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, rr.dwibitharia@gmail.com

Diterima : 05 Maret 2026; Direvisi : 16 April 2026; Disetujui : 26 April 2026
<https://doi.org/10.37250/khazanah.v8i1.408>

Abstract

The development of Indonesia's palm oil plantation sector faces complex sustainability challenges, including low smallholder productivity, limited land legality, and weak compliance with the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) standards. In Jambi Province, these issues have prompted the local government to establish the Regional Action Plan for Sustainable Palm Oil (RAD-KSB) as a governance instrument to strengthen institutional capacity, improve farmer performance, and enhance supply chain management. This study aims to analyze the implementation of the RAD-KSB policy and its contribution to strengthening the sustainability of palm oil farming at the subnational level. A descriptive qualitative design with an intrinsic case study approach was applied, using key informant interviews, questionnaires, and document reviews. Data were analyzed using George C. Edward III's policy implementation model, which assesses communication, resources, disposition, and bureaucratic structure through a Likert scale. The results indicate that resources (3.8) and bureaucratic structure (3.5) are categorized as good, supported by extension services and multi-stakeholder forums, while communication (2.7) and implementer disposition (2.6) remain moderate due to limited regulatory literacy and misaligned staff competencies. Significant land legality gaps also hinder ISPO certification. It is concluded that improving the effectiveness of RAD-KSB requires spatial data integration, digital communication systems, bureaucratic simplification, and enhanced implementer capacity and incentives to achieve sustainable palm oil governance at the regional level.

Keywords: Palm Oil, RAD-KSB, Public Policy, Sustainability

Abstrak

Pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia menghadapi tantangan keberlanjutan yang kompleks, meliputi rendahnya produktivitas pekebun swadaya, keterbatasan legalitas lahan, serta kepatuhan terhadap standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Di Provinsi Jambi, kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) sebagai instrumen penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas petani, dan perbaikan rantai pasok. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah implementasi kebijakan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) di Provinsi Jambi sebagai instrumen



Penguatan Tata Kelola Kelapa Sawit Berkelanjutan Di Tingkat Daerah
: Studi Kebijakan RAD-KSB Provinsi Jambi -

M. Abdul Aziz, Ahmad Subhan, Fuad Muchlis dan Rr.Dwi Betharia Endahayu | 15

penguatan tata kelola usaha kelapa sawit. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik, melalui wawancara aktor kunci, kuesioner, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dengan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sumber daya (3,8) dan struktur birokrasi (3,5) berada pada kategori baik, didukung oleh ketersediaan penyuluh dan forum multipihak, sedangkan komunikasi (2,7) dan disposisi pelaksana (2,6) masih cukup akibat rendahnya literasi regulasi petani dan penempatan SDM yang belum sesuai kompetensi. Kesenjangan legalitas lahan juga masih tinggi sehingga menghambat sertifikasi ISPO. Disimpulkan bahwa efektivitas RAD-KSB memerlukan integrasi data spasial, digitalisasi komunikasi, penyederhanaan birokrasi, serta penguatan kapasitas dan insentif pelaksana guna mewujudkan tata kelola sawit berkelanjutan di tingkat daerah.

Kata kunci: Kelapa Sawit, RAD-KSB, Kebijakan Publik, Keberlanjutan

PENDAHULUAN

Sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Ekspansi areal tanam dan tingginya permintaan global terhadap minyak sawit mendorong komoditas ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah sentra produksi. Namun demikian, peningkatan kontribusi ekonomi tersebut diiringi oleh berbagai tantangan keberlanjutan, terutama pada level pekebun swadaya, seperti rendahnya produktivitas, penggunaan benih tidak bersertifikat, keterbatasan akses pembiayaan dan teknologi, serta lemahnya kapasitas kelembagaan petani. Selain itu, persoalan legalitas lahan, konflik tenurial, dan tekanan terhadap lingkungan turut memunculkan risiko sosial-ekologis yang dapat menghambat keberlanjutan industri sawit dalam jangka Panjang(Santika et al., 2021); (Jelsma et al., 2017)

Provinsi Jambi merupakan salah satu sentra strategis perkebunan kelapa sawit nasional dengan struktur usaha yang didominasi oleh pekebun swadaya. Ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap komoditas ini cukup tinggi, sehingga keberlanjutan tata kelola sawit menjadi faktor penting bagi stabilitas pembangunan daerah(Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2023). Meskipun demikian, berbagai indikator menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas di lapangan, antara lain rendahnya kepatuhan terhadap standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), lambatnya proses legalisasi lahan, serta lemahnya koordinasi kelembagaan dalam mendukung praktik budidaya yang produktif dan ramah lingkungan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan

pembangunan sawit tidak dapat hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi perlu didukung oleh tata kelola kebijakan yang efektif dan terintegrasi.

Sebagai respons atas isu keberlanjutan tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) sebagai kerangka kebijakan untuk memperbaiki legalitas, kapasitas pelaku usaha, serta transparansi rantai pasok. Kebijakan ini kemudian diturunkan pada tingkat daerah melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) yang disesuaikan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan agraris masing-masing wilayah. Di Provinsi Jambi, RAD-KSB berfungsi sebagai instrumen koordinatif lintas sektor untuk mendorong penguatan kelembagaan, peningkatan produktivitas, dan penerapan praktik budidaya berkelanjutan. Namun demikian, keberadaan dokumen kebijakan belum tentu menjamin efektivitas implementasi di lapangan.

Secara konseptual, keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses implementasinya. (Edwards, 1980) menegaskan bahwa efektivitas implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Tanpa dukungan keempat aspek tersebut, kebijakan berisiko mengalami kesenjangan antara perencanaan dan hasil aktual. Dalam konteks pembangunan perkebunan sawit, lemahnya komunikasi regulasi, keterbatasan kapasitas institusi daerah, serta fragmentasi koordinasi antar-organisasi dapat menjadi penghambat tercapainya tujuan keberlanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek teknis produksi, dampak lingkungan, atau kinerja ekonomi usahatani kelapa sawit, sementara studi yang secara spesifik mengevaluasi implementasi kebijakan RAD-KSB di tingkat provinsi masih relatif terbatas. Keterbatasan ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait pemahaman empiris mengenai bagaimana kebijakan keberlanjutan sawit dijalankan dan faktor-faktor apa yang menentukan keberhasilannya pada level daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis implementatif yang sistematis untuk menilai efektivitas RAD-KSB sebagai instrumen tata kelola pembangunan sawit berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan RAD-KSB di Provinsi Jambi dengan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III. Studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta faktor

penghambat pelaksanaan kebijakan, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis bagi penguatan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di tingkat daerah.

Sebelum adanya RAD-KSB, tata kelola perkebunan kelapa sawit di tingkat daerah cenderung bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara sistematis. Koordinasi antar organisasi perangkat daerah masih terbatas, data pekebun belum terstandarisasi, serta implementasi prinsip keberlanjutan seperti ISPO belum berjalan secara optimal di tingkat pekebun swadaya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara arah kebijakan nasional dan praktik di tingkat lapangan, sehingga diperlukan suatu kerangka kebijakan yang mampu mengintegrasikan berbagai aspek tata kelola secara lebih komprehensif.

Secara khusus, penelitian ini menjawab pertanyaan: (1) bagaimana kondisi implementasi RAD-KSB ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi; (2) kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya; dan (3) strategi kebijakan apa yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas keberlanjutan usahatani kelapa sawit di Provinsi Jambi.

LANDASAN TEORI

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik. Keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga oleh berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di lapangan.

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi penyampaian kebijakan, sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia dan pendukung lainnya, disposisi mengacu pada komitmen dan sikap pelaksana kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme dan prosedur organisasi dalam menjalankan kebijakan.

Faktor pertama adalah komunikasi, yang menekankan pentingnya penyampaian tujuan, prosedur, dan instruksi kebijakan secara jelas kepada seluruh pelaksana. Komunikasi yang tidak efektif sering menjadi penyebab utama kegagalan implementasi, karena pelaksana mungkin tidak memahami apa yang harus dilakukan atau bagaimana melaksanakannya. Dengan komunikasi yang baik,

seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama dan langkah-langkah yang seragam dalam pelaksanaan kebijakan.

Faktor kedua adalah sumber daya, mencakup ketersediaan anggaran, tenaga ahli, sarana, dan teknologi yang memadai. Tanpa sumber daya yang cukup, implementasi kebijakan akan terhambat, meskipun tujuan dan prosedur sudah jelas. Ketersediaan sumber daya menjadi prasyarat kritis agar pelaksana dapat menjalankan program sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan.

Faktor ketiga adalah disposisi pelaksana, yang berkaitan dengan motivasi, komitmen, dan kepedulian aparat terhadap tujuan program. Aparat atau pegawai yang tidak termotivasi cenderung mengabaikan prosedur dan tanggung jawab, bahkan jika sumber daya tersedia secara memadai. Oleh karena itu, membangun disposisi yang positif melalui pelatihan, penghargaan, dan kepemimpinan yang baik menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan.

Faktor keempat adalah struktur birokrasi, yang mencakup koordinasi antarunit, hierarki organisasi, serta mekanisme pengambilan keputusan. Struktur birokrasi yang efisien memungkinkan aliran informasi yang lancar, pengambilan keputusan yang tepat waktu, dan koordinasi yang harmonis antarunit, sehingga program dapat berjalan efektif. Sebaliknya, struktur yang rumit atau terfragmentasi dapat menyebabkan keterlambatan, duplikasi, atau kebingungan dalam pelaksanaan.

Dengan memperhatikan keempat faktor ini, Model Edward III memberikan panduan praktis bagi perancang dan pelaksana kebijakan untuk meningkatkan peluang keberhasilan program, menunjukkan bahwa implementasi yang efektif bukan hanya soal merancang kebijakan yang baik, tetapi juga memastikan komunikasi, sumber daya, motivasi pelaksana, dan struktur birokrasi mendukung tujuan tersebut.

Rencana Aksi Nasional/Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN/ RAD KSB)

Kerangka kerja nasional Indonesia mengenai pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan berlandaskan pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB). (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020)

RAN-KSB 2019–2024 ditata melalui lima komponen strategis yang menjadi landasan bagi 28 program, 92 kegiatan, dan 118 output. Kelima komponen tersebut disusun untuk membentuk peta jalan nasional yang memperbaiki tata kelola perizinan, meningkatkan produktivitas petani, memperkuat data dan informasi

perkebunan, mendukung perlindungan lingkungan, serta memperbaiki koordinasi lintas lembaga.

Secara historis, hadirnya RAN-KSB merupakan respons pemerintah terhadap dinamika global dan nasional terkait keberlanjutan industri sawit. Meningkatnya tuntutan pasar internasional terhadap sawit berkelanjutan, komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, serta kebutuhan harmonisasi regulasi pusat-daerah menjadi landasan kuat bagi lahirnya Inpres No. 6/2019. Instruksi ini memberikan mandat langsung kepada 14 kementerian/lembaga, 26 pemerintah provinsi, dan 217 pemerintah kabupaten penghasil sawit untuk melaksanakan program RAN-KSB sesuai dengan mandat, kapasitas, dan karakteristik wilayah masing-masing. RAD-KSB adalah dokumen turunan dari RAN-KSB yang berfungsi menjabarkan prioritas strategis nasional ke dalam konteks lokal melalui perencanaan yang lebih spesifik, operasional, dan sesuai kebutuhan daerah.

Di tingkat Provinsi Jambi, komitmen terhadap keberlanjutan sawit diwujudkan melalui terbitnya Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Jambi 2020–2024. Instruksi Gubernur (INGUB) ini merupakan bentuk adaptasi sekaligus afirmasi kebijakan daerah atas amanat Inpres No. 6/2019. INGUB tersebut memberikan arahan kepada seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan RAD-KSB, mengintegrasikan rencana aksi ke dalam perencanaan pembangunan daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan monitoring dan evaluasi berjalan efektif. Selain itu, INGUB ini menegaskan urgensi Jambi sebagai salah satu provinsi sentra kelapa sawit nasional yang membutuhkan tata kelola yang lebih baik, terutama terkait peningkatan produktivitas petani rakyat, penyelesaian konflik agraria, percepatan sertifikasi ISPO, dan perbaikan sistem data perkebunan. (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan fokus pada telaah implementasi kebijakan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) dalam memperkuat keberlanjutan usahatani kelapa sawit di Provinsi Jambi. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap proses, dinamika kelembagaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pada konteks spesifik daerah.

Ruang lingkup analisis mencakup evaluasi kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan RAD-KSB berdasarkan lima komponen keberlanjutan kebijakan daerah serta empat faktor implementasi kebijakan menurut Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil analisis diarahkan untuk mengidentifikasi kesenjangan implementasi, hambatan, peluang, serta merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan.

Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan selama periode Mei hingga Desember 2025, yang mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data, analisis, hingga pengolahan data. Penelitian dilaksanakan di Provinsi Jambi yang dipilih secara purposif karena merupakan salah satu sentra utama perkebunan kelapa sawit nasional dan telah mengimplementasikan kebijakan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) secara bertahap melalui dua periode perencanaan, yaitu 2019–2024 dan 2025–2029. Kondisi tersebut menjadikan Jambi relevan sebagai lokasi studi untuk menganalisis implementasi kebijakan keberlanjutan pada tingkat daerah.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini mencakup seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) di Provinsi Jambi, yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, pelaku usaha perkebunan, petani swadaya, lembaga pendamping, dan akademisi. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, penentuan sampel dilakukan secara non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden yang dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan RAD-KSB.

Berdasarkan kriteria tersebut, responden penelitian ditetapkan sebanyak delapan informan kunci, yang terdiri atas dua pengusaha/perusahaan kelapa sawit, dua petani swadaya, dua perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait perkebunan dan perencanaan, satu perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan satu akademisi. Komposisi ini dipilih untuk merepresentasikan perspektif multipihak (*multi-stakeholder*) sehingga memungkinkan analisis implementasi kebijakan dilakukan secara komprehensif dari sisi regulator, pelaku usaha,

masyarakat, dan pihak independen. Apabila diperlukan, penambahan informan dilakukan melalui teknik snowball sampling untuk memperkaya informasi.

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur menggunakan kuesioner serta observasi lapangan guna memahami kondisi faktual pelaksanaan RAD-KSB, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi, termasuk dokumen kebijakan, laporan instansi, dan data statistik perkebunan. Jumlah responden ditetapkan berdasarkan prinsip kecukupan informasi (data saturation) untuk menjamin kedalaman dan validitas temuan penelitian.

Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui; 1) Wawancara semi-terstruktur menggunakan kuesioner, 2) Observasi lapangan terhadap pelaksanaan program RAD-KSB.

Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pemahaman terhadap implementasi kebijakan, meliputi pemerintah daerah/OPD terkait, pekebun swadaya atau kelembagaan petani, pelaku usaha/perusahaan sawit, lembaga swadaya masyarakat, serta akademisi.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur, seperti dokumen RAD-KSB, laporan kinerja pemerintah daerah, regulasi, publikasi ilmiah, serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan implementasi kebijakan kelapa sawit berkelanjutan.

Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Proses analisis mengacu pada model interaktif (Miles et al., 2013) yang meliputi; 1) Reduksi data, yaitu seleksi, pengelompokan, dan penyederhanaan data yang relevan; 2) Penyajian data, dalam bentuk narasi, matriks, tabel, dan skema untuk memudahkan interpretasi; 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan secara berulang selama proses penelitian.

Analisis difokuskan pada; 1) kesenjangan antara rencana dan implementasi RAD-KSB, 2) identifikasi hambatan dan peluang pelaksanaan, 3) dampaknya terhadap keberlanjutan usahatani kelapa sawit.

Untuk mendukung interpretasi temuan kualitatif, sebagian data persepsi informan dikuantifikasi menggunakan analisis skoring skala Likert (1–5) guna

mengukur tingkat implementasi kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan efektivitas program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Provinsi Jambi periode 2025–2029 dilaksanakan melalui lima komponen utama, yaitu: (A) penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur; (B) peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun; (C) pengelolaan dan pemantauan lingkungan; (D) tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; serta (E) sertifikasi berkelanjutan, hilirisasi, dan peningkatan akses pasar. Kelima komponen tersebut dioperasionalkan melalui program lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pendekatan multipihak.

Pada Komponen A, pemerintah provinsi membentuk Tim Pelaksana Daerah (TPD), memperkuat forum koordinasi lintas sektor, serta melakukan pemutakhiran data geospasial dan pendataan pekebun melalui E-STDB. Selain itu, pembangunan dan pemeliharaan jalan perkebunan meningkatkan aksesibilitas rantai pasok TBS.

Pada Komponen B, kegiatan difokuskan pada pelatihan teknis budidaya, penguatan kelembagaan pekebun, pendampingan koperasi, serta fasilitasi pembiayaan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelatihan meningkatkan pemahaman pekebun mengenai praktik budidaya baik (good agricultural practices) dan persiapan sertifikasi.

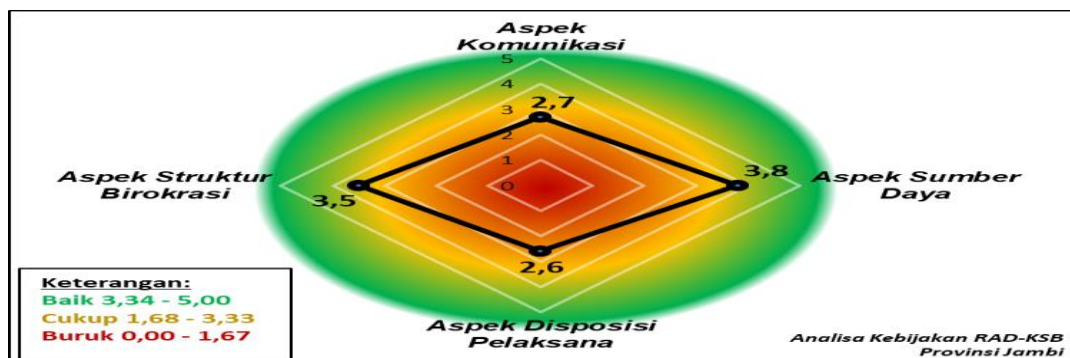
Pada Komponen C, implementasi mencakup perlindungan ekosistem gambut, pembentukan kelompok tani peduli api, inventarisasi emisi GRK, dan pemanfaatan limbah sawit sebagai energi terbarukan. Program ini berkontribusi pada pencegahan kebakaran lahan dan pengurangan emisi.

Pada Komponen D, kegiatan diarahkan pada legalisasi lahan melalui skema perhutanan sosial, penyelesaian konflik tenurial, serta peningkatan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dan K3.

Sementara itu, Komponen E berfokus pada percepatan sertifikasi ISPO, pendampingan Internal Control System (ICS), penguatan kemitraan pekebun–perusahaan, serta penyusunan peta hilirisasi industri sawit untuk meningkatkan nilai tambah produk.

Analisis Implementasi Kebijakan Berdasarkan Edward III

Evaluasi implementasi kebijakan dilakukan melalui empat aspek Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penilaian persepsi responden disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Analisis Aspek Implementasi Kebijakan RAD-KSB Provinsi Jambi 2024-2029
Sumber: Olahan Data Primer, 2025

Hasil menunjukkan bahwa sumber daya dan struktur birokrasi relatif kuat, sedangkan komunikasi dan disposisi pelaksana masih memerlukan penguatan.

Aspek Komunikasi pada Implementasi RAD-KSB Provinsi Jambi

Aspek komunikasi memperoleh skor 2,7 (kategori cukup), menunjukkan bahwa penyampaian tujuan kebijakan, instruksi pelaksanaan, dan koordinasi antaraktor telah berlangsung tetapi belum optimal. Upaya komunikasi dilakukan melalui pembentukan tim pelaksana daerah, forum multipihak, serta kegiatan monitoring dan supervisi sebagai sarana penyelarasan persepsi.

Namun, efektivitas komunikasi masih terkendala oleh terbatasnya jangkauan sosialisasi hingga tingkat desa dan pekebun, pemanfaatan media komunikasi yang belum optimal, serta variasi pemahaman antaraktor, sehingga informasi belum sepenuhnya merata dan responsif. Kondisi ini konsisten dengan temuan dalam penelitian kebijakan publik lain, di mana komunikasi yang kurang efektif berkontribusi pada penurunan efektivitas pelaksanaan program (Alauddin et al., 2025). Temuan ini juga sejalan dengan studi oleh (Sangkop et al., 2023) yang menekankan perlunya kanal komunikasi yang terstruktur untuk memastikan konsistensi pemahaman di semua tingkat implementasi.

Dalam konteks kebijakan sawit, (Suratiningsih et al., 2023) menemukan bahwa komunikasi kebijakan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) di tingkat

lapangan belum mampu menjangkau semua pemangku kepentingan secara optimal, sehingga pemahaman tentang standar dan persyaratan kebijakan belum merata di kelompok pekebun. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan komunikasi merupakan tantangan umum dalam implementasi kebijakan sektor publik dan khususnya kebijakan kehutanan/perkebunan

Aspek Sumber Daya pada Implementasi RAD-KSB Provinsi Jambi

Aspek sumber daya memperoleh skor 3,8 (kategori baik), menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran, tenaga pendamping, sarana-prasarana, serta teknologi informasi relatif memadai untuk menunjang pelaksanaan RAD-KSB. Sumber daya yang kuat tercermin dalam penyediaan penyuluh dan aparatur kompeten, pembangunan infrastruktur jalan perkebunan, serta pengembangan database pekebun dan sistem informasi geospasial untuk pendampingan, pelatihan dan monitoring.

Temuan ini sejalan dengan hasil (Hidayat & Kemala, 2022) pada implementasi kebijakan pengelolaan barang milik negara yang menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya dan dukungan birokrasi yang memadai merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi. Namun demikian, efektivitas sumber daya dalam RAD-KSB masih dipengaruhi oleh distribusi yang belum merata antarwilayah, koordinasi antarinstansi yang perlu ditingkatkan, serta pemanfaatan teknologi yang bervariasi di antara pelaksana.

Dalam konteks kebijakan sawit lainnya, penelitian (Pratama & Yusran, 2022) pada Program Peremajaan Sawit Rakyat di Jambi menunjukkan bahwa kendala distribusi dan koordinasi sumber daya menjadi hambatan dalam pelaksanaan program, terutama di tingkat desa.

Aspek Disposisi Pelaksana pada Implementasi RAD-KSB Provinsi Jambi

Nilai disposisi pelaksana adalah 2,6 (kategori cukup–rendah), yang menunjukkan bahwa motivasi, komitmen, dan kepedulian aparatur terhadap keberhasilan RAD-KSB masih perlu diperkuat. Disposisi yang rendah dipengaruhi oleh variasi motivasi individu, keterbatasan kompetensi teknis, serta ketidakkonsistenan pelaksanaan antarunit kerja, yang berdampak pada belum meratanya kualitas implementasi.

Dalam studi kebijakan sawit, (Pratama & Yusran, 2022) juga menunjukkan bahwa motivasi dan komitmen pelaksana di tingkat desa seringkali menjadi faktor penentu dalam keberhasilan program peremajaan sawit rakyat.

Aspek Struktur Birokrasi pada Implementasi RAD-KSB Provinsi Jambi

Aspek struktur birokrasi memperoleh skor 3,5 (kategori baik), yang menunjukkan bahwa struktur organisasi dan mekanisme koordinasi relatif mendukung pelaksanaan RAD-KSB. Forum multipihak dan rapat koordinasi rutin membantu aliran informasi, pembagian tugas, serta pengambilan keputusan secara terarah.

Namun, beberapa kendala masih terlihat, antara lain fragmentasi antarinstansi, potensi tumpang tindih kewenangan, lambatnya pengambilan keputusan lintas sektor, serta belum meratanya koordinasi di tingkat lapangan. Temuan ini konsisten dengan temuan (Azizah et al., 2025) pada kebijakan kearsipan digital yang menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang kompleks dapat menjadi hambatan apabila peran dan batasan kewenangan tidak jelas. Dalam kebijakan sawit, artikel (Novrini et al., 2025) juga menyoroti bahwa birokrasi yang kurang terintegrasi dapat memperlambat respon terhadap dinamika sektor dan hambatan pemangku kepentingan.

Gambaran Kondisi, Hambatan, dan Rekomendasi Implementasi RAD-KSB

Berdasarkan analisis empat aspek implementasi kebijakan menurut kerangka (Edwards, 1980), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, efektivitas pelaksanaan RAD-KSB di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh keterkaitan antar faktor tersebut. Setiap aspek memiliki kekuatan sekaligus hambatan yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan program secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi kondisi, tantangan, dampak, serta rekomendasi perbaikan secara sistematis, yang dirangkum dalam tabel untuk memudahkan pemahaman dan evaluasi kebijakan.

Tabel 1. Matriks Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Implementasi RAD-KSB di Provinsi Jambi dan Rekomendasi Perbaikan

Faktor	Kondisi Saat Ini	Hambatan	Dampak pada Keberlanjutan	Rekomendasi
Komunikasi	Sosialisasi terbatas	Petani kurang paham	Praktik tidak seragam	Tingkatkan pelatihan dan materi komunikasi
Sumber Daya	Anggaran terbatas	Tidak semua desa tercakup	Implementasi lambat	Tambahkan anggaran dan tenaga ahli
Disposisi Pelaksana	Motivasi sedang	Kurang insentif	Kepatuhan rendah	Program penghargaan/pendampingan
Struktur Birokrasi	Terfragmentasi	Koordinasi lambat	Implementasi tidak efektif	Sederhanakan alur koordinasi

Sumber: Olahan Data, 2025

Analisis Kebijakan RAD-KSB di Provinsi Jambi dari empat faktor kunci Edward III menunjukkan beberapa tantangan yang memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan program. Pada aspek komunikasi, sosialisasi kebijakan masih terbatas sehingga sebagian petani kurang memahami tujuan dan prosedur RAD-KSB, yang mengakibatkan praktik pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan belum seragam. Untuk mengatasi hal ini, perlu peningkatan pelatihan, penyederhanaan materi komunikasi, serta pemanfaatan kanal komunikasi digital untuk menjangkau semua pihak.

Aspek sumber daya menghadapi keterbatasan anggaran dan tenaga ahli, sehingga tidak semua desa dapat tercakup dalam implementasi program, yang berdampak pada lambatnya pelaksanaan RAD-KSB. Penambahan alokasi anggaran serta penempatan tenaga ahli secara strategis menjadi langkah penting untuk mempercepat implementasi dan memastikan cakupan program lebih merata.

Dalam hal disposisi pelaksana, motivasi dan kepatuhan aparat serta kelompok pekebun masih sedang, dipengaruhi oleh minimnya insentif dan pendampingan. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kepatuhan terhadap standar pengelolaan berkelanjutan. Solusi yang direkomendasikan adalah pengembangan program penghargaan, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen pelaksana.

Terakhir, struktur birokrasi yang terfragmentasi menyebabkan koordinasi antarunit lambat dan implementasi kebijakan tidak selalu efektif. Penyederhanaan alur koordinasi, penegasan tanggung jawab antarinstansi, serta mekanisme pengambilan keputusan yang lebih cepat dan harmonis sangat diperlukan untuk memastikan program berjalan optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berikut merupakan rangkuman berdasarkan analisis yang telah dilakukan:

1. Implementasi RAD-KSB di Provinsi Jambi menunjukkan variasi performa pada empat aspek utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.
2. Aspek sumber daya memiliki skor tertinggi, namun keterbatasan anggaran dan tenaga ahli menyebabkan cakupan program belum merata dan memperlambat implementasi. Struktur birokrasi yang terfragmentasi dan koordinasi yang lambat menghambat efektivitas pelaksanaan. Selain itu, komunikasi yang terbatas menyebabkan kurangnya pemahaman petani dan pelaku terkait

kebijakan, sementara motivasi pelaksana yang sedang dan minim insentif berdampak pada rendahnya kepatuhan terhadap standar pengelolaan berkelanjutan.

3. Perbaikan komunikasi, penambahan sumber daya, peningkatan motivasi pelaksana, dan penyederhanaan struktur birokrasi diperlukan untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas program RAD-KSB di Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

Alauddin Athfal, S., Kader, A., & Abdul Radjak, D. (2025). Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Sikap Dan Struktur Birokrasi (Edward-lil) Dalam Pelayanan Haji Di Halmahera Timur. In *Jurnal Nomosleca* (Vol. 11, Number 2). <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/n>

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. (2023). Roadmap Kelapa Sawit Provinsi Jambi 2024-2028.

Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press. <https://books.google.co.id/books?id=nQtHAAAAMAAJ>

Hidayat, A., & Kemala, F. (2022). Implementation Of State Property Management Policy At The Secretariat General Of The General Election Supervisory Agency Republic Of Indonesia. In *JIPRL Journal of Indonesia Law & Policy Review* _____ 2715-498X (Vol. 45, Number 2). <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?>

Jelsma, I., Schoneveld, G. C., Zoomers, A., & van Westen, A. C. M. (2017). Unpacking Indonesia's independent oil palm smallholders: An actor-disaggregated approach to identifying environmental and social performance challenges. *Land Use Policy*, 69, 281–297. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.012>

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Panduan Penyusunan Dan Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Khairunisa Azizah, F., Rajab Strategi Implementasi Kebijakan Kearsipan Digital Pada Kementerian Pendidikan, R., Menengah Fadhila Khairunisa Azizah, dan, & Rajab, R. (n.d.). Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 7660. 3, 2025. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2423>

Miles, M., Huberman, M., & Saldaña, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. In *Zeitschrift fur Personalforschung* (Vol. 28).

Novrini, S., Nasution, I., Nurali, M., Pratama, A., Oksa, A. M., & Limbong, R. S. (2025). Government Policies and Their Impact on Palm Oil Agribusiness. *International Journal of Natural Science Studies and Development (IJOSS)*, 02, 141–147. <https://doi.org/10.55299/ijoss.v2i1.21>

- Pratama, A., & Yusran, R. (2022). Implementasi Kebijakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Program Peremajaan Sawit Rakyat di Desa Rantau Ikil Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16691–16697.
- Sangkop, P. R., Pati, A. B., & Egeten, M. M. (2023). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik: (Studi di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Manado). *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 12(3), 418–429. <https://doi.org/10.35797/jp.v12i3.50241>
- Santika, T., Wilson, K. A., Law, E. A., St John, F. A. V., Carlson, K. M., Gibbs, H., Morgans, C. L., Ancrenaz, M., Meijaard, E., & Struebig, M. J. (2021). Impact of palm oil sustainability certification on village well-being and poverty in Indonesia. *Nature Sustainability*, 4(2), 109–119. <https://doi.org/10.1038/s41893-020-00630-1>
- Suratiningsih, D., Hardilina, H., Anugrah, A. R. S., Safira, S., & Puspita, D. (2023). Implementation of the Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) Policy on Oil Palm Plantations in West Kalimantan. *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(2), 10–22. <https://doi.org/10.18196/jhi.v12i2.15505>